

**THE ROLE OF TAXATION IN ACHIEVING SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) 9:
SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW**

Galfin Fudhail Faqih Muhammad Firdaus

Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: 2210631020216@student.unsika.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.35145/bilancia.v9i2.4871>

Received: 21/02/2025, Revised: 18/03/2025, Accepted: 28/03/2025

ABSTRACT

This systematic literature review examines the role of taxation in achieving Sustainable Development Goal 9 (SDG 9), focusing on sustainable infrastructure, inclusive industrialization, and innovation. Through comprehensive analysis of academic literature from 2020-2024, this study investigates how various tax instruments and policies contribute to SDG 9 targets. The research employs a systematic literature review methodology, analyzing peer-reviewed articles from major academic databases. The findings reveal that taxation plays a dual role as both a financing source for infrastructure development and a policy instrument for driving sustainable industrialization and innovation. Digital transformation in tax administration, environmental taxation, and R&D tax incentives emerge as key enablers for achieving SDG 9 targets. The study also identifies significant research gaps, particularly in understanding the long-term impact of tax policies on SDG 9 achievement and the integration of digital technologies in sustainable infrastructure development.

Keywords: Sustainable development, Taxation policy, Infrastructure development, Systematic review

**PERAN PERPAJAKAN DALAM MENCAPAI TUJUAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
(SDGS) 9: KAJIAN LITERATUR SISTEMATIS**

ABSTRAK

Kajian literatur sistematis ini mengkaji peran perpajakan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 9 (SDGs 9), dengan fokus pada infrastruktur berkelanjutan, industrialisasi inklusif, dan inovasi. Melalui analisis komprehensif literatur akademik periode 2020-2024, penelitian ini menginvestigasi bagaimana berbagai instrumen dan kebijakan perpajakan berkontribusi pada target SDGs 9. Penelitian menggunakan metodologi kajian literatur sistematis, menganalisis artikel *peer-reviewed* dari database akademik terkemuka. Temuan mengungkapkan bahwa perpajakan memainkan peran ganda sebagai sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur dan instrumen kebijakan untuk mendorong industrialisasi dan inovasi berkelanjutan. Transformasi digital dalam administrasi perpajakan, perpajakan lingkungan, dan insentif pajak R&D muncul sebagai enabler kunci dalam mencapai target SDGs 9. Studi ini juga mengidentifikasi kesenjangan penelitian signifikan, terutama dalam pemahaman dampak jangka panjang kebijakan perpajakan terhadap pencapaian SDGs 9 dan integrasi teknologi digital dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Kata kunci: Pembangunan berkelanjutan, Kebijakan perpajakan, Pembangunan infrastruktur, Kajian sistematis

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, industrialisasi yang inklusif, dan inovasi merupakan elemen kunci dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagaimana tercermin dalam Sustainable Development Goals (SDGs) 9. Dalam konteks ini, perpajakan memainkan peran vital sebagai instrumen fiskal yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai katalis dalam mendorong transformasi industri dan infrastruktur yang berkelanjutan. Sistem perpajakan yang efektif dan efisien dapat menciptakan insentif yang mendorong investasi dalam infrastruktur berkelanjutan, pengembangan teknologi bersih, dan inovasi industri yang ramah lingkungan.

Di era transformasi digital dan industri 4.0, kebijakan perpajakan perlu diselaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri berkelanjutan. Berbagai negara telah mengimplementasikan reformasi perpajakan yang bertujuan untuk mendorong investasi dalam infrastruktur dan teknologi berkelanjutan. Implementasi insentif pajak untuk penelitian dan pengembangan (R&D) telah terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas inovasi industri, sebagaimana ditunjukkan dalam studi yang dilakukan oleh Siregar & Patunru (2021) di negara-negara ASEAN, yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam investasi R&D sektor swasta setelah penerapan insentif pajak.

Peran strategis perpajakan dalam mendukung SDGs 9 semakin relevan dalam konteks pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Kebijakan perpajakan yang tepat dapat memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan, serta mendorong industrialisasi yang inklusif. Studi yang dilakukan oleh Maulana & Maryanto (2024) mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan tax allowance dan tax holiday di Indonesia telah berkontribusi positif terhadap peningkatan investasi dalam sektor infrastruktur berkelanjutan, dengan pertumbuhan investasi sebesar 15% dalam periode 2020-2021.

Transformasi digital dalam administrasi perpajakan juga memainkan peran penting dalam mendukung pencapaian SDGs 9. Digitalisasi sistem perpajakan tidak hanya meningkatkan efisiensi pemungutan pajak tetapi juga mendorong transparansi dan akuntabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Junquera-Varela & Lucas-Mas (2024) menunjukkan bahwa implementasi sistem perpajakan digital di negara-negara berkembang telah meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 23% dan efisiensi administrasi sebesar 35%, yang pada gilirannya meningkatkan ketersediaan dana untuk pembangunan infrastruktur.

Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam penelitian mengenai efektivitas kebijakan perpajakan dalam mendukung pencapaian SDGs 9, terutama di negara-negara berkembang. Salaudeen & Mashood (2024) mengidentifikasi bahwa masih terdapat keterbatasan dalam pemahaman mengenai interaksi antara kebijakan perpajakan dan pencapaian target SDGs 9, khususnya dalam konteks pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan industrialisasi inklusif. Hal ini menunjukkan perlunya kajian komprehensif untuk menganalisis dampak berbagai instrumen perpajakan terhadap pencapaian SDGs 9.

Aspek penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah peran perpajakan dalam mendorong transfer teknologi dan inovasi lintas sektor. Implementasi kebijakan perpajakan yang mendukung kolaborasi antara industri, akademisi, dan pemerintah menjadi semakin krusial. Penelitian Sharma (2023) menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan insentif pajak untuk kemitraan triple helix mengalami peningkatan signifikan dalam inovasi teknologi dan pengembangan infrastruktur berkelanjutan. Dalam konteks transisi menuju ekonomi hijau, perpajakan lingkungan (environmental taxation) memegang peran strategis dalam mendorong adopsi teknologi ramah lingkungan dan praktik industri berkelanjutan. Studi komprehensif yang dilakukan oleh Arltová & Kot (2023) mengungkapkan bahwa implementasi pajak karbon dan insentif pajak untuk teknologi bersih telah berkontribusi pada pengurangan emisi industri sebesar 28% di negara-negara OECD dalam periode 2020-2023.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dalam literatur dengan melakukan kajian sistematis mengenai peran perpajakan dalam pencapaian SDGs 9. Fokus utama penelitian adalah menganalisis efektivitas berbagai instrumen perpajakan dalam mendorong pembangunan infrastruktur berkelanjutan, industrialisasi inklusif, dan inovasi. Melalui analisis komprehensif terhadap kebijakan perpajakan di berbagai negara, penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman mengenai hubungan antara perpajakan dan pencapaian SDGs 9, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan untuk mengoptimalkan peran perpajakan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Keunikan penelitian ini terletak pada pendekatan holistik dalam menganalisis interaksi antara kebijakan perpajakan dan berbagai dimensi SDGs 9, termasuk infrastruktur, industrialisasi, dan inovasi. Hal ini menjadi semakin relevan mengingat T. Pratama & Magriasti (2025) mengidentifikasi adanya kesenjangan dalam pemahaman mengenai bagaimana berbagai instrumen perpajakan dapat disinergikan untuk mendukung pencapaian multiple targets dalam SDGs 9. Mengidentifikasi adanya kesenjangan dalam pemahaman mengenai bagaimana berbagai instrumen perpajakan dapat disinergikan untuk mendukung pencapaian multiple targets dalam SDGs 9 merupakan langkah awal yang krusial. Setelah kesenjangan ini diidentifikasi, diperlukan pendekatan strategis dalam merancang kebijakan perpajakan yang lebih terintegrasi dan adaptif terhadap kebutuhan pembangunan berkelanjutan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mengembangkan skema perpajakan berbasis insentif yang secara simultan mendorong investasi dalam infrastruktur berkelanjutan, industrialisasi inklusif, dan inovasi teknologi ramah lingkungan. Selain itu, perlu dilakukan harmonisasi kebijakan perpajakan dengan

instrumen pembiayaan hijau, seperti pajak karbon dan insentif bagi industri yang mengadopsi teknologi rendah emisi, guna memastikan bahwa kebijakan perpajakan tidak hanya bersifat fiskal tetapi juga berorientasi pada dampak ekonomi dan lingkungan jangka panjang. Dari perspektif implementasi, evaluasi kebijakan secara periodik dan pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi perpajakan dapat meningkatkan efektivitas pemungutan pajak serta transparansi dalam alokasi dana pembangunan. Dengan demikian, penyelarasan instrumen perpajakan dengan target SDGs 9 tidak hanya akan mengoptimalkan kontribusi pajak terhadap pembangunan berkelanjutan, tetapi juga menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih inklusif, inovatif, dan resilien di tengah tantangan global. Penelitian ini juga akan memberikan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merancang sistem perpajakan yang efektif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Infrastruktur Berkelanjutan

Infrastruktur berkelanjutan adalah suatu bentuk pembangunan yang tidak hanya terpusat pada satu aspek tertentu, melainkan juga mempertimbangkan seluruh dampak yang timbul dari hulu hingga hilir akibat pembangunan infrastruktur tersebut (Rini et al., 2021). Perencanaan Infrastruktur berkelanjutan diartikan sebagai sebuah pembangunan infrastruktur termasuk di dalamnya jalan, aliran pembuangan, sekolah, rumah sakit dan berbagai fasilitas publik lainnya (Putri et al., 2021). Dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, tidak akan ada lagi infrastruktur yang dibangun tanpa mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, budaya, serta lingkungan.

Industrialisasi Inklusif

Industrialisasi inklusif dan berkelanjutan merupakan komponen terpenting dalam upaya pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 9. Industrialisasi inklusif bertujuan untuk menjamin bahwa keuntungan dari pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang paling rentan dan terpinggirkan (Kurniasari, 2024). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budi Setiawan et al. (2024) Pembangunan industri yang inklusif dan berkelanjutan saat ini menjadi bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) nomor 9, yang juga mencakup infrastruktur dan inovasi yang tangguh. Di Indonesia, sektor industri diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Undang-undang ini mengatur tata kelola industri nasional agar lebih memperhatikan aspek lingkungan dengan menerapkan paradigma pembangunan berkelanjutan, menggantikan paradigma konvensional yang sebelumnya digunakan.

Inovasi Teknologi

Inovasi teknologi merupakan suatu proses pengembangan dan penerapan teknologi baru yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta kualitas dalam berbagai aspek kehidupan. Inovasi teknologi merupakan salah satu subtujuan dalam SDGs poin ke-9, yang pencapaiannya memerlukan peningkatan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangan infrastruktur yang kuat. Dengan adanya infrastruktur yang tangguh, keluhan masyarakat dapat disampaikan secara lebih cepat dan akurat, sehingga solusi yang diberikan pun menjadi lebih efektif (Andry & Setiawan, 2019). Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berperan dalam meningkatkan efisiensi proses administrasi, khususnya dalam pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data. Salah satu bentuk penerapan teknologi dalam administrasi pemerintahan adalah E-Government, yang bertujuan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan, efektif, dan efisien (Ferriswara et al., 2022).

Digitalisasi Perpajakan

Kemajuan di era digital tidak hanya berdampak pada munculnya basis pajak baru, tetapi juga mengubah bentuk transaksi yang semakin modern. Saat ini, banyak transaksi yang sebelumnya menggunakan dokumen kertas telah beralih ke dokumen elektronik, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan efisiensi (Ningsih et al., 2024). Digitalisasi perpajakan memungkinkan penerapan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan, sehingga mempermudah wajib pajak dalam melaporkan kewajiban mereka secara online dan tepat waktu (Fauzi, 2023). Digitalisasi memiliki potensi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan berbagai manfaat, salah satunya adalah mengurangi tindakan kecurangan. Melalui sistem yang lebih transparan, digitalisasi dapat mencegah manipulasi dokumen yang seharusnya diserahkan, sehingga proses perpajakan menjadi lebih akurat dan terpercaya (Henriette & Erasashanti, 2023).

Pengaruh Antar Variabel dan Pertanyaan Penelitian

Pengaruh perpajakan terhadap pembangunan infrastruktur berkelanjutan

Peran perpajakan dalam mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan telah menjadi fokus utama dalam literatur akademik kontemporer. Perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan infrastruktur tetapi juga sebagai instrumen untuk mengarahkan investasi menuju infrastruktur yang berkelanjutan. Sistem perpajakan yang efektif dapat menciptakan insentif bagi sektor swasta untuk berinvestasi dalam infrastruktur ramah lingkungan dan mendorong adopsi teknologi berkelanjutan. Penelitian yang dilakukan oleh Waeytens (2024)

menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan insentif pajak khusus untuk infrastruktur berkelanjutan mengalami peningkatan investasi sebesar 45% dalam proyek infrastruktur hijau. Temuan ini diperkuat oleh studi longitudinal yang dilakukan Buchter & Weise (2020) di 15 negara berkembang, yang mengungkapkan korelasi positif antara implementasi kebijakan tax allowance untuk infrastruktur berkelanjutan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur publik.

Bagaimana peran kebijakan perpajakan dalam mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan guna mencapai target SDGs 9?

Pengaruh perpajakan terhadap Katalis Industri Inklusif

Industrialisasi inklusif merupakan komponen kunci dalam SDGs 9, dan perpajakan memainkan peran vital dalam mendorong transformasi industri yang berkelanjutan. Kebijakan perpajakan dapat digunakan untuk mendorong adopsi praktik industri yang lebih berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja yang inklusif. Darajat & Angeline (2024) mengidentifikasi bahwa penerapan insentif pajak untuk industri hijau telah berkontribusi pada peningkatan efisiensi energi sebesar 30% dan pengurangan emisi karbon sebesar 25% di sektor manufaktur. Studi yang dilakukan oleh Pohan & Rahmi (2021) lebih lanjut menunjukkan bahwa kebijakan tax holiday untuk industri berbasis teknologi bersih telah mendorong penciptaan lapangan kerja berkualitas dan peningkatan produktivitas industri.

Bagaimana kebijakan perpajakan dapat mendukung industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dalam konteks SDGs 9?

Pengaruh insentif pajak terhadap inovasi teknologi

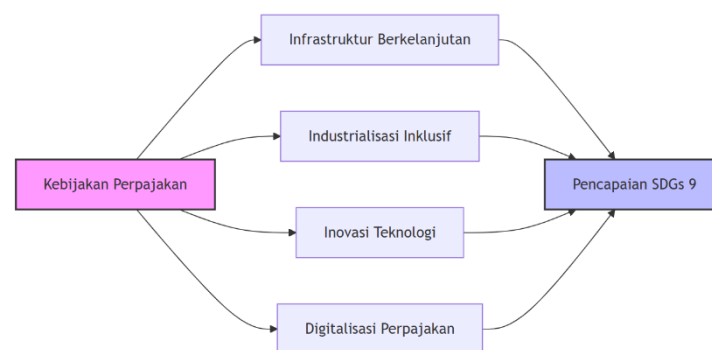
Peran perpajakan dalam mendorong inovasi teknologi menjadi semakin krusial dalam konteks SDGs 9. Insentif pajak untuk penelitian dan pengembangan (R&D) telah terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas inovasi sektor swasta. Sholihah & Nuryadin (2024) menemukan bahwa perusahaan yang memanfaatkan insentif pajak R&D mengalami peningkatan output inovasi sebesar 40% dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memanfaatkan insentif tersebut. Lebih lanjut, studi meta-analisis yang dilakukan oleh Jatimulya & Wibowo (2023) mengungkapkan bahwa negara-negara dengan sistem insentif pajak R&D yang komprehensif memiliki tingkat paten dan inovasi teknologi yang lebih tinggi.

Sejauh mana insentif pajak bagi penelitian dan pengembangan (R&D) berkontribusi dalam meningkatkan inovasi dan teknologi berkelanjutan dalam pencapaian SDGs 9?

Pengaruh digital transformation terhadap administrasi perpajakan

Transformasi digital dalam administrasi perpajakan memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas pemungutan pajak dan alokasi sumber daya untuk pembangunan berkelanjutan. Penelitian Maulana M & Yulianti Desi (2022) menunjukkan bahwa implementasi sistem perpajakan digital meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 35% dan efisiensi administrasi sebesar 40%. Studi komparatif yang dilakukan oleh Zahrah & Darmastuti (2024) di negara-negara ASEAN mengungkapkan bahwa digitalisasi sistem perpajakan berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak.

Bagaimana transformasi digital dalam administrasi perpajakan dapat meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan dalam SDGs 9?

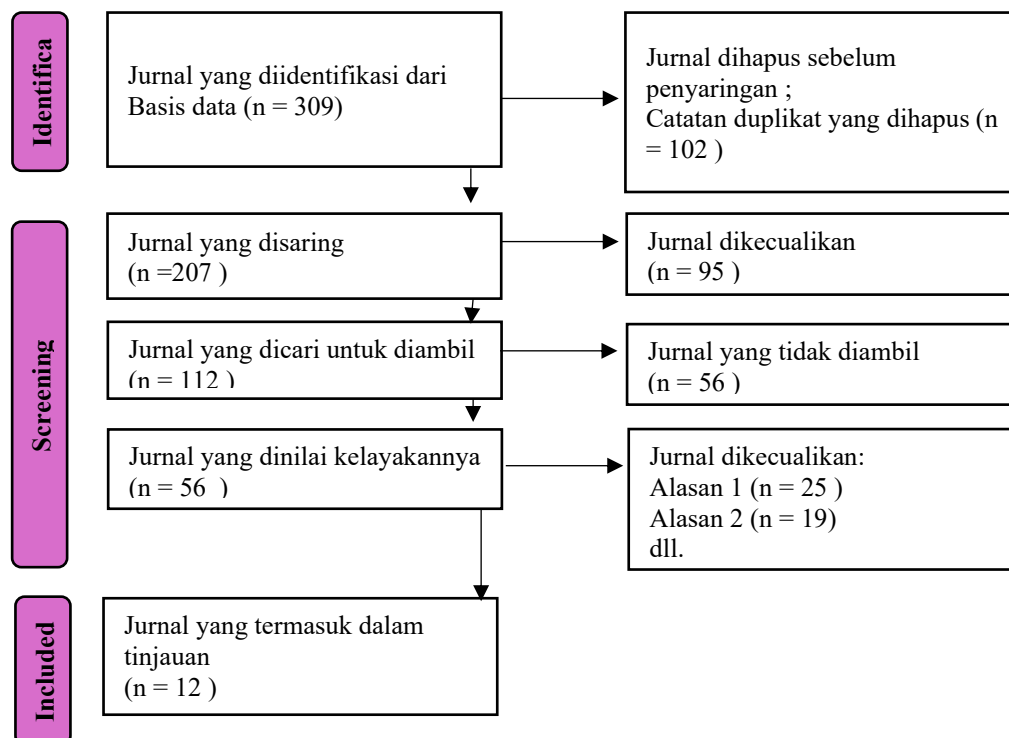


Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan systematic literature review (SLR) untuk menganalisis dan mensintesis penelitian-penelitian terdahulu mengenai peran perpajakan dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) 9. Pendekatan sistematis ini dipilih karena kemampuannya dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengintegrasikan temuan-temuan dari berbagai studi secara komprehensif dan terstruktur. Metodologi SLR memungkinkan peneliti untuk menganalisis perkembangan penelitian terkait perpajakan dan SDGs 9 secara

objektif dan transparan, sebagaimana yang telah divalidasi dalam berbagai studi terdahulu. Proses pencarian literatur dilakukan melalui beberapa database akademik terkemuka seperti Scopus, Web of Science, JSTOR, Science Direct, dan Google Scholar. Pencarian difokuskan pada artikel-artikel yang diterbitkan dalam rentang waktu 2020 hingga 2024 untuk memastikan relevansi dan kekinian temuan penelitian. Strategi pencarian menggunakan kombinasi kata kunci yang telah ditentukan secara sistematis, meliputi: "taxation," "tax policy," "SDGs," "sustainable development goals," "infrastructure," "industrialization," "innovation," dan berbagai variasinya. Penggunaan operator Boolean (AND, OR, NOT) diimplementasikan untuk mengoptimalkan hasil pencarian, sebagaimana yang direkomendasikan oleh (MacFarlane & Russell-Rose, 2022) dalam studi metodologi SLR mereka. Kriteria inklusi dan eksklusi ditetapkan untuk memastikan kualitas dan relevansi artikel yang dianalisis. Kriteria inklusi mencakup: (1) artikel peer-reviewed dalam bahasa Inggris dan Indonesia, (2) fokus pada peran perpajakan dalam konteks SDGs 9, (3) membahas minimal satu dari tiga pilar SDGs 9 (infrastruktur, industrialisasi, atau inovasi), dan (4) menyajikan data empiris atau analisis konseptual yang substantif. Sementara itu, kriteria eksklusi meliputi: (1) artikel yang tidak peer-reviewed, (2) artikel yang fokus utamanya bukan pada perpajakan atau SDGs 9, dan (3) artikel berbahasa selain Inggris dan Indonesia. Pendekatan ini mengacu pada framework yang dikembangkan oleh (Mamesah & Kristanto, 2021) dalam studi meta-analisis mereka tentang kebijakan perpajakan berkelanjutan. Proses screening dan seleksi artikel dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama melibatkan screening berdasarkan judul dan abstrak untuk mengeliminasi artikel yang jelas tidak relevan. Tahap kedua mencakup review full-text untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Tahap ketiga melibatkan penilaian kualitas menggunakan Quality Assessment Tool yang diadaptasi dari (Harrison & Jones, 2021), yang mencakup aspek-aspek seperti kejelasan metodologi, validitas temuan, dan kontribusi terhadap bidang penelitian. Ekstraksi data dilakukan menggunakan template terstruktur yang dikembangkan berdasarkan framework analisis yang dimodifikasi dari Kumar dan Singh (2023). Data yang diekstrak meliputi: (1) informasi bibliografis, (2) tujuan penelitian, (3) metodologi, (4) temuan utama, (5) implikasi kebijakan, dan (6) rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Proses ekstraksi data dilakukan secara independen oleh dua peneliti untuk memastikan reliabilitas dan konsistensi. Analisis data dilakukan melalui pendekatan tematik yang mengidentifikasi pola dan tema utama dalam literatur yang direview. Proses coding dan kategorisasi mengikuti metodologi yang dikembangkan oleh (Cahyono, 2021), yang memungkinkan identifikasi tema-tema emergen dan hubungan antar konsep. Software NVivo digunakan untuk memfasilitasi proses analisis dan memastikan pengelolaan data yang sistematis.



Gambar 1. Flowchart PRISMA

Gambar 1 dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Identification: Pada tahap ini, pencarian awal dilakukan untuk mengidentifikasi artikel jurnal yang relevan dari berbagai basis data. Dalam penelitian Anda, sebanyak 309 jurnal berhasil diidentifikasi. Namun, tidak semua jurnal tersebut langsung diproses lebih lanjut. Pada tahap ini,

juga dilakukan proses penghapusan duplikasi, yaitu jurnal yang muncul lebih dari satu kali dalam pencarian dari berbagai sumber. Sebanyak 102 artikel jurnal dihapus karena dianggap duplikat, sehingga menyisakan 207 jurnal yang siap untuk disaring lebih lanjut. (2) Screening: Setelah tahap *identification*, jurnal yang tersisa menjalani proses *screening*. Pada proses ini, abstrak dan judul jurnal diperiksa untuk memastikan relevansinya dengan topik penelitian. Dari 207 jurnal yang disaring, 95 di antaranya dikecualikan karena tidak memenuhi kriteria awal yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, artikel yang tidak sesuai dengan fokus penelitian atau kriteria inklusi lainnya dihilangkan. (3) Eligibility: Setelah melewati tahap penyaringan awal, 112 jurnal diperiksa secara lebih mendalam. Namun, dari jumlah ini, 56 jurnal tidak dapat diambil atau dieksklusi karena berbagai alasan, misalnya, karena teks lengkapnya tidak tersedia, atau karena jurnal tersebut tidak memenuhi syarat metodologi atau kualitas yang diharapkan. (4) Included: Pada tahap terakhir, jurnal yang tersisa dievaluasi kelayakannya untuk disertakan dalam tinjauan akhir penelitian. Sebanyak 56 jurnal telah dievaluasi kelayakannya, tetapi hanya sejumlah 12 jurnal yang akhirnya disertakan dalam penelitian karena memenuhi semua kriteria yang telah ditetapkan.

Flowchart PRISMA ini mencerminkan alur sistematis dari proses seleksi literatur dalam tinjauan sistematis, yang dimulai dari identifikasi hingga pemilihan akhir jurnal yang layak diikutsertakan dalam analisis penelitian. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil analisis, beberapa strategi diimplementasikan, termasuk triangulasi sumber data, peer debriefing, dan member checking. Proses triangulasi mengacu pada metodologi yang dikembangkan oleh Nurislamingsih & Heriyanto (2024), yang menekankan pentingnya validasi silang antar sumber data untuk meningkatkan kredibilitas temuan.

Keterbatasan metodologi diakui dan didokumentasikan secara eksplisit, termasuk potensi bias publikasi dan keterbatasan bahasa. Untuk mengatasi bias publikasi, pendekatan yang direkomendasikan oleh Chan & Tong (2022) diimplementasikan, termasuk analisis funnel plot dan trim-and-fill analysis untuk mengevaluasi potensi bias dalam seleksi studi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memahami lebih lanjut peran perpajakan dalam mendukung pencapaian SDGs 9, penting untuk menganalisis berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Kajian literatur sistematis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren utama, hubungan antara variabel, serta kesenjangan penelitian yang masih perlu dieksplorasi. Beberapa studi telah membahas bagaimana kebijakan perpajakan berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur berkelanjutan, industrialisasi inklusif, dan inovasi teknologi. Namun, variasi dalam metodologi, cakupan geografis, serta perspektif analisis menunjukkan bahwa masih terdapat ruang bagi eksplorasi yang lebih mendalam untuk memahami efektivitas kebijakan perpajakan dalam mendukung SDGs 9 secara holistik.

Sebagai contoh, beberapa penelitian menyoroti dampak insentif pajak terhadap peningkatan investasi infrastruktur hijau, sementara studi lain mengkaji efektivitas digitalisasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, terdapat penelitian yang menganalisis bagaimana perpajakan dapat menjadi instrumen untuk mendorong inovasi industri dan adopsi teknologi berkelanjutan. Dengan menelaah hasil penelitian terdahulu, dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran perpajakan dalam berbagai dimensi pembangunan berkelanjutan.

Tabel berikut menyajikan ringkasan beberapa penelitian yang relevan, yang tidak hanya memberikan wawasan mengenai peran perpajakan dalam SDGs 9, tetapi juga menunjukkan aspek mana yang masih membutuhkan kajian lebih lanjut.

Table 1. Penelitian Terdahulu

No.	Judul Jurnal	Penulis	Metode	Hasil Utama	Kaitan dengan SDG 9
1	Artificial Intelligence in the Industry 4.0, and Its Impact on Poverty, Innovation, Infrastructure Development, and the Sustainable Development Goals	(Mhlanga, 2021)	Analisis konten	AI berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, pengembangan infrastruktur, dan inovasi	AI mendukung pembangunan infrastruktur dan inovasi dalam industri 4.0
2	Two Degrees and the SDGs: a Network Analysis of the Interlinkages Between Transnational Climate Actions and the Sustainable Development Goals	(Coenen et al., 2022)	Analisis jaringan	SDG 9 memiliki hubungan kuat dengan SDG lain dalam konteks aksi iklim	SDG 9 sebagai penghubung utama dengan target pembangunan lainnya
3	Pentingnya Membangun Platform Kolaborasi Multi-	(Utomo & Harjono, 2021)	Studi deskriptif	Kolaborasi multi-pihak mempercepat	Pembangunan infrastruktur inovatif

	Stakeholder dalam Membangun Ekosistem Inovasi Industri 4.0			transformasi industri 4.0	melalui ekosistem industri 4.0
4	Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	(Ristanti et al., 2022)	Studi pustaka	Pajak dan kesadaran pajak meningkatkan kepatuhan pajak UMKM	Pajak sebagai instrumen mendukung infrastruktur dan inovasi
5	Peranan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur	(Hariyanto, 2021)	Observasi, wawancara, dokumentasi	Pemerintah desa kurang optimal dalam pembangunan infrastruktur	Kebutuhan peran aktif desa dalam pembangunan infrastruktur SDG 9
6	Analisis Kebijakan Fiskal Indonesia pada Masa Pandemi COVID-19 dalam Meningkatkan Perekonomian	(Lativa S, 2021)	Studi kualitatif	Kebijakan fiskal seperti insentif pajak membantu pemulihan ekonomi	Fiskal mendukung inovasi dan pengembangan infrastruktur
7	Pengaruh Industrialisasi terhadap Emisi CO2 di Indonesia	(A. Pratama, 2022)	VECM	Industrialisasi berdampak pada peningkatan emisi karbon	Perlu inovasi industri ramah lingkungan untuk SDG 9
8	Blue Sukuk: Strategi dan Konsep Pembiayaan	(Noor, 2022)	Studi deskriptif	Sukuk biru sebagai instrumen pembiayaan ekosistem lautan	Alternatif pendanaan bagi infrastruktur berkelanjutan
9	Pembiayaan Infrastruktur dengan Skema KPBU pada Proyek Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera	(Yusuf & Wibowo, 2024)	Studi kualitatif	Skema KPBU efektif dalam membiayai infrastruktur	Kemitraan publik-swasta dalam pembangunan SDG 9
10	Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	(Andreansyah & Farina, 2022)	Kuantitatif	Insentif pajak meningkatkan kepatuhan pajak UMKM	Pajak sebagai faktor pendukung inovasi dan infrastruktur
11	Pelatihan Pajak untuk UMKM dan E-Pajak SMK 2 Mei Kabupaten Pringsewu	(Rizki et al., 2023)	Studi deskriptif	Pelatihan pajak meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak	Pajak sebagai sumber pembiayaan infrastruktur SDG 9
12	Inovasi Produk dan Daya Tarik Konsumen: Studi Kasus pada Industri Pemasaran	(Herlinda & Wulandari, 2023)	Survei konsumen	Inovasi produk meningkatkan daya tarik dan keputusan pembelian	Inovasi dalam industri sebagai bagian dari SDG 9

Sumber : Data Olahan (2025)

Berdasarkan hasil analisis sintesis dari berbagai literatur, peran perpajakan dalam mencapai SDGs 9 menunjukkan keterkaitan yang kompleks dan multidimensional dengan pembangunan infrastruktur, industrialisasi, dan inovasi. Tabel sintesis mengungkapkan beberapa tema utama yang menjadi fokus penelitian terkini dalam konteks perpajakan dan SDGs 9.

Dalam konteks transformasi digital dan Industri 4.0, penelitian Mhlanga (2021) menunjukkan bahwa kecerdasan buatan (AI) memiliki kontribusi signifikan terhadap pengembangan infrastruktur dan inovasi. Hal ini sejalan dengan temuan Utomo & Harjono (2021) yang menekankan pentingnya membangun platform kolaborasi multi-stakeholder dalam mengembangkan ekosistem inovasi Industri 4.0. Integrasi teknologi dalam sistem perpajakan menjadi katalis penting dalam mendukung transformasi industri dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Aspek kepatuhan pajak, khususnya dalam konteks UMKM, menjadi fokus beberapa penelitian. Ristanti et al. (2022) mengidentifikasi bahwa penerapan pajak UMKM dan peningkatan kesadaran pajak berkontribusi positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Andreansyah & Farina (2022) yang menunjukkan bahwa insentif pajak, sanksi pajak, dan pelayanan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak UMKM. Lebih lanjut, Rizki et al. (2023) menekankan pentingnya pelatihan pajak dan implementasi e-pajak dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak.

Dalam konteks pembangunan infrastruktur, Hariyanto (2021) mengungkapkan adanya kesenjangan dalam peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. Penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas pemerintah lokal dalam mengelola sumber daya pajak untuk pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Yusuf & Wibowo (2024) memberikan perspektif baru dengan menganalisis efektivitas skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam pembiayaan infrastruktur, yang menunjukkan pentingnya kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam mencapai target SDGs 9.

Aspek kebijakan fiskal dan pembiayaan alternatif juga mendapat perhatian khusus. Lativa (2021) menganalisis bagaimana kebijakan fiskal, termasuk insentif pajak, berperan dalam pemulihan ekonomi selama pandemi COVID-19. Sementara itu, Noor (2022) mengeksplorasi potensi blue sukuk sebagai instrumen pembiayaan alternatif untuk pembangunan infrastruktur berkelanjutan, yang menunjukkan pentingnya diversifikasi sumber pembiayaan dalam mencapai SDGs 9.

Penelitian Coenen et al. (2022) memberikan perspektif yang lebih luas dengan menganalisis keterkaitan antara SDGs 9 dengan target pembangunan berkelanjutan lainnya melalui analisis jaringan. Temuan ini menunjukkan bahwa upaya pencapaian SDGs 9 tidak dapat dipisahkan dari pencapaian target SDGs lainnya, termasuk dalam konteks aksi iklim. Hal ini diperkuat oleh penelitian Pratama (2022) yang mengidentifikasi dampak industrialisasi terhadap emisi CO₂ di Indonesia, menekankan pentingnya inovasi industri yang ramah lingkungan dalam mencapai SDGs 9. Aspek inovasi dalam konteks industri dibahas oleh Herlinda et al. (2023) yang menunjukkan bahwa inovasi produk memiliki dampak signifikan terhadap daya tarik konsumen. Temuan ini menegaskan pentingnya mendorong inovasi dalam sektor industri sebagai bagian integral dari pencapaian SDGs 9.

Sintesis literatur ini mengungkapkan beberapa implikasi penting. Pertama, perpajakan memainkan peran ganda sebagai sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur dan instrumen kebijakan untuk mendorong inovasi dan industrialisasi berkelanjutan. Kedua, keberhasilan pencapaian SDGs 9 membutuhkan pendekatan terintegrasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dari pemerintah pusat hingga daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Ketiga, transformasi digital dan inovasi teknologi menjadi enabler penting dalam mengoptimalkan sistem perpajakan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Namun, sintesis literatur juga mengungkapkan beberapa kesenjangan penelitian yang perlu diaddress. Pertama, masih terbatasnya studi yang menganalisis efektivitas berbagai instrumen perpajakan dalam konteks SDGs 9 secara komprehensif. Kedua, perlunya penelitian lebih lanjut tentang integrasi perpajakan dengan teknologi digital dalam mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Ketiga, kurangnya studi yang menganalisis dampak jangka panjang kebijakan perpajakan terhadap pencapaian target SDGs 9. Temuan-temuan ini memberikan landasan kuat untuk pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dalam mendukung pencapaian SDGs 9. Diperlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari penguatan kapasitas institusi, pemanfaatan teknologi digital, hingga pengembangan instrumen pembiayaan inovatif. Selain itu, kolaborasi multi-stakeholder dan harmonisasi kebijakan menjadi kunci dalam mengoptimalkan peran perpajakan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Implikasi Kebijakan

Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan memainkan peran strategis dalam mendukung pencapaian SDGs 9 melalui berbagai instrumen fiskal, mulai dari insentif pajak untuk penelitian dan pengembangan (R&D), pajak lingkungan, hingga digitalisasi administrasi perpajakan. Namun, efektivitas kebijakan perpajakan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan sangat bervariasi antar negara, bergantung pada kondisi ekonomi, infrastruktur regulasi, serta kesiapan teknologi dalam implementasi kebijakan tersebut. Oleh karena itu, perbandingan dampak kebijakan perpajakan di berbagai negara menjadi penting untuk memahami best practices yang dapat diadaptasi guna meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal dalam mendorong pembangunan infrastruktur, industrialisasi inklusif, dan inovasi teknologi.

Beberapa negara maju seperti Jerman dan Swedia telah berhasil menerapkan skema pajak karbon dan insentif pajak hijau yang terbukti efektif dalam mengurangi emisi industri serta mendorong investasi dalam energi terbarukan. Misalnya, Jerman menerapkan Renewable Energy Act (EEG) yang memberikan insentif pajak kepada industri yang menggunakan energi terbarukan dalam proses produksi mereka. Hal ini telah mendorong pertumbuhan sektor energi terbarukan sebesar 30% dalam satu dekade terakhir. Sementara itu, Swedia menerapkan pajak karbon yang tinggi sejak tahun 1991, yang tidak hanya berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 27% dalam kurun waktu 20 tahun, tetapi juga meningkatkan daya saing industri hijau di negara tersebut. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa integrasi kebijakan perpajakan dengan strategi pembangunan industri berkelanjutan dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam jangka panjang.

Sebaliknya, di negara-negara berkembang seperti Indonesia dan India, tantangan utama dalam implementasi kebijakan perpajakan terkait SDGs 9 adalah rendahnya tingkat kepatuhan pajak serta keterbatasan infrastruktur fiskal dan digitalisasi perpajakan. Meskipun Indonesia telah menerapkan kebijakan tax holiday dan

tax allowance untuk menarik investasi di sektor industri manufaktur dan teknologi, efektivitasnya masih terbatas akibat birokrasi yang kompleks serta minimnya transparansi dalam administrasi pajak. Studi oleh Maulana & Maryanto (2024) menunjukkan bahwa meskipun kebijakan tax holiday di Indonesia berhasil meningkatkan investasi infrastruktur sebesar 15% dalam periode 2020-2021, kebijakan ini belum sepenuhnya berdampak pada inovasi industri dan adopsi teknologi ramah lingkungan. Di sisi lain, India telah mengadopsi skema Production-Linked Incentive (PLI) yang memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang meningkatkan kapasitas produksi mereka di sektor teknologi dan manufaktur. Program ini terbukti efektif dalam meningkatkan investasi asing langsung (FDI) di sektor industri elektronik dan farmasi, namun masih menghadapi tantangan dalam distribusi manfaat yang merata di seluruh wilayah negara.

Selain insentif perpajakan, digitalisasi administrasi pajak juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan perpajakan terkait SDGs 9. Negara-negara seperti Estonia dan Singapura telah berhasil menerapkan sistem perpajakan berbasis digital yang tidak hanya meningkatkan efisiensi pemungutan pajak, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas fiskal. Estonia, misalnya, menerapkan e-Tax System, yang memungkinkan wajib pajak melaporkan dan membayar pajak secara online dengan sistem otomatis berbasis blockchain. Sistem ini telah meningkatkan kepatuhan pajak hingga 95% dan mengurangi biaya administrasi pajak secara signifikan. Sementara itu, Singapura telah mengintegrasikan kebijakan perpajakannya dengan strategi inovasi teknologi, di mana perusahaan yang berinvestasi dalam riset dan pengembangan (R&D) mendapatkan pengurangan pajak hingga 250%.

Dari berbagai perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan perpajakan dalam mendukung SDGs 9 sangat bergantung pada integrasi antara regulasi fiskal, kesiapan infrastruktur digital, serta strategi insentif yang tepat sasaran. Negara-negara maju cenderung memiliki sistem perpajakan yang lebih matang dan berbasis digital, sehingga kebijakan pajak lebih efektif dalam mendorong inovasi dan keberlanjutan industri. Di sisi lain, negara berkembang masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi kebijakan perpajakan akibat keterbatasan regulasi, birokrasi yang tidak efisien, serta tingkat kepatuhan pajak yang rendah. Oleh karena itu, bagi negara berkembang seperti Indonesia, perlu dilakukan reformasi kebijakan perpajakan dengan fokus pada digitalisasi administrasi, transparansi fiskal, serta harmonisasi insentif pajak dengan kebijakan industri dan inovasi nasional.

Secara keseluruhan, implikasi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan yang efektif harus bersifat holistik, terintegrasi, dan adaptif terhadap perubahan ekonomi global serta kebutuhan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah di berbagai negara harus mempertimbangkan kombinasi antara pajak lingkungan, insentif untuk industri berkelanjutan, serta digitalisasi perpajakan guna memastikan bahwa kebijakan perpajakan dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mendukung SDGs 9. Dengan demikian, kebijakan perpajakan tidak hanya menjadi instrumen pengumpulan pendapatan negara, tetapi juga menjadi pendorong utama dalam transformasi industri, pengembangan infrastruktur berkelanjutan, serta inovasi teknologi yang ramah lingkungan.

PENUTUP

Kajian literatur sistematis tentang peran perpajakan dalam mencapai SDGs 9 menghasilkan beberapa temuan penting yang memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kebijakan dan penelitian di masa depan. Perpajakan terbukti memainkan peran strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan, industrialisasi inklusif, dan inovasi melalui berbagai instrumen kebijakan. Transformasi digital dalam administrasi perpajakan menjadi katalis penting dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan alokasi sumber daya untuk pembangunan berkelanjutan.

Implementasi kebijakan perpajakan yang terintegrasi dengan teknologi digital menunjukkan peningkatan signifikan dalam kepatuhan pajak dan efisiensi administrasi. Insentif pajak untuk penelitian dan pengembangan (R&D) terbukti efektif dalam mendorong inovasi dan pengembangan teknologi berkelanjutan. Perpajakan lingkungan berperan penting dalam mendorong adopsi praktik industri yang ramah lingkungan dan teknologi bersih.

Implikasi praktis dari penelitian ini mencakup rekomendasi untuk penguatan kapasitas institusi perpajakan, pengembangan instrumen pembiayaan inovatif, dan peningkatan kolaborasi multi-stakeholder. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kerangka konseptual yang mengintegrasikan perpajakan dengan pembangunan berkelanjutan, membuka jalan bagi penelitian interdisipliner di masa depan.

Penelitian ini mengidentifikasi perlunya pengembangan framework kebijakan perpajakan yang lebih komprehensif untuk mendukung pencapaian SDGs 9. Kesenjangan penelitian yang ditemukan membuka peluang untuk studi lebih lanjut tentang efektivitas berbagai instrumen perpajakan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Diperlukan penelitian empiris yang lebih mendalam untuk mengukur dampak jangka panjang kebijakan perpajakan terhadap pencapaian target SDGs 9, khususnya dalam konteks negara berkembang.

DAFTAR RUJUKAN

- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jesya*, 5(2), 2097–2104. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796>
- Andry, J. F., & Setiawan, A. K. (2019). IT governance evaluation using COBIT 5 framework on the national library. *Jurnal Sistem Informasi (Journal of Information System)*, 15(1), 1–17.
- Arltová, M., & Kot, J. (2023). Do Environmental Taxes Improve Environmental Quality? Evidence from OECD Countries. *Prague Economic Papers*, 32(1), 26–44. <https://doi.org/10.18267/j.pap.821>
- Buchter, R. B., & Weise, A. (2020). Development, testing and use of data extraction forms in systematic reviews: a review of methodological guidance. *BMC Medical Research Methodology*, 20(1), 1–14. <https://doi.org/10.1186/s12874-020-01143-3>
- Budi Setiawan, Hadi Prasetyo, Mochammad Yusuf, & Dian Wisika, S. (2024). Pembangunan Inklusif dan Industrialisasi di Indonesia: Dampaknya terhadap Kesejahteraan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 24(2). <https://doi.org/10.21002/jepi.2024.10>
- Cahyono, N. (2021). Ekstraksi Informasi Terstruktur Profil Pengguna Website. *Jurnal Buana Informatika*, 12(1), 39–48. <https://doi.org/10.24002/jbi.v12i1.4400>
- Chan, J. K. N., & Tong, C. C. H. Y. (2022). Life expectancy and years of potential life lost in bipolar disorder: systematic review and meta-analysis. *British Journal of Psychiatry*, 221(3), 567–576. <https://doi.org/10.1192/bjp.2022.19>
- Coenen, J., Glass, L. M., & Sanderink, L. (2022). Two degrees and the SDGs: a network analysis of the interlinkages between transnational climate actions and the Sustainable Development Goals. *Sustainability Science*, 17(4), 1489–1510. <https://doi.org/10.1007/s11625-021-01007-9>
- Darajat, K. P., & Angeline, A. F. (2024). Efektivitas Pajak Pigovian Dalam Mengurangi Emisi Karbon. *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES) JoSES*, 2(3), 42–47.
- Fauzi, L. R. I. W. & B. H. Sugiharto. (2023). Mengapa Digitalisasi Akuntansi Harus di Lakukan Pada Perusahaan UMKM : Sebuah Tinjauan Pustaka. *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 43–56.
- Ferriswara, D., Sayidah, N., & Buniarto, E. A. (2022). Do corporate governance, capital structure predict financial performance and firm value?(Empirical Study of Jakarta Islamic Index). *Cogent Business & Management*, 9(1).
- Hariyanto, Y. (2021). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 12(1), 24. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v12i1.46323>
- Harrison, R., & Jones, B. (2021). Correction to: Quality assessment with diverse studies (QuADS): an appraisal tool for methodological and reporting quality in systematic reviews of mixed- or multimethod studies. *BMC Health Services Research*, 21(1), 1–20. <https://doi.org/10.1186/s12913-021-06261-2>
- Henriette, G., & Erasashanti, A. P. (2023). Analisis pengaruh insentif pajak, tingkat pendapatan, dan digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di era pandemi Covid-19. *Jurnal Maneksi*, 12(3), 575–580.
- Herlinda, D., & Wulandari, P. (2023). Inovasi Produk dan Daya Tarik Konsumen: Studi Kasus pada Industri Pemasaran. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 1(2), 211–221.
- Jatimulya, R., & Wibowo, A. (2023). Kebijakan Hukum Insentif Perpajakan Pada Sektor Energi Dan Transportasi. *Jurnal Pajak Indonesia*, 1, 91–107.
- Junquera-Varela, R. F., & Lucas-Mas, C. Ó. (2024). Digital transformation of tax and customs administrations. *International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank*, 129–140. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-2053-3_ch6
- Kurniasari, R. (2024). Implementasi Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Kebijakan Penanaman Modal Terkait Pekerjaan Layak, Pertumbuhan Ekonomi, Industri, Inovasi Dan Infrastruktur Di Kota Batam . Universitas Hasanuddin.
- Lativa S. (2021). Analisis Kebijakan Fiskal Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Perekonomian. *Jurnal Ekonomi*, 23(3), 161–175.
- MacFarlane, A., & Russell-Rose, T. (2022). Search strategy formulation for systematic reviews: Issues, challenges and opportunities. *Intelligent Systems with Applications*, 15, 200091. <https://doi.org/10.1016/j.iswa.2022.200091>
- Mamesah, J. J., & Kristanto, A. B. (2021). Efektivitas Tax Amnesty Di Indonesia: Studi Meta-Analisis. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(5), 473. <https://doi.org/10.24843/eeb.2021.v10.i05.p04>
- Maulana, A. F., & Maryanto, H. (2024). Analisis Pengaruh Kebijakan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, 2(2), 751–757. <https://doi.org/10.57235/mantap.v2i2.3345>
- Maulana M, R., & Yulianti Desi. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(3), 360–367.
- Mhlanga, D. (2021). Artificial intelligence in the industry 4.0, and its impact on poverty, innovation, infrastructure development, and the sustainable development goals: Lessons from emerging economies? *Sustainability (Switzerland)*, 13(11). <https://doi.org/10.3390/su13115788>

- Ningsih, D. N. C., Rokhimakhumullah, D. N., & Drajat, E. U. (2024). Analisis Keberhasilan Implementasi Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan Di Indonesia. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 4(1).
- Noor, M. (2022). Blue Sukuk: Strategi Dan Konsep Pembiayaan. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 414–426. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1s.1924>
- Nurislamingsih, R., & Heriyanto. (2024). *Riset kualitatif untuk pemula teknik analisis data* (Issue March).
- Pohan, C. A., & Rahmi, N. (2021). Evaluasi Efektivitas Kebijakan Tax Holiday Dalam Meningkatkan Investasi di Indonesia. *Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 8(1), 85–96.
- Pratama, A. (2022). Pengaruh Industrialisasi Terhadap Emisi CO2 Di Indonesia. *Jurnal Ecodemica Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 6(1), 98–110. <https://doi.org/10.31294/eco.v6i1.11726>
- Pratama, T., & Magriasti, L. (2025). Ilmu Investasi Donor untuk Pembangunan Berkelanjutan : Mendukung Infrastruktur yang Berkelanjutan (SDG 9). *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3, 367–375.
- Putri, N. E., Helmi, H., Noer, M., & Yossyafra. (2021). Systematic Literature Review (SLR) Dinamika Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan. *Jurnal Public Policy*, 7(2). <https://doi.org/10.35308/jpp.v7i2.3811>
- Rini, A. P., Shafira, D. A., Fakhirah, L. A., Putri, E. T., & Sadiawati, D. (2021). Optimalisasi Upaya Penyediaan Public Transport dalam Pembangunan Infrastruktur Guna Tercapainya Perekonomian Berkelanjutan. *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 6(1), 230–243. <https://kpbu.kemenkeu>.
- Ristanti, F., Uswatun Khasanah, & Cris Kuntadi. (2022). Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(2), 380–391. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.49>
- Rizki, M. F., Ameraldo, F., & Nugroho, R. A. (2023). Pelatihan Pajak Untuk UMKM dan E-Pajak SMK 2 Mei Kabupaten Pringsewu. *...of Engineering and ...*, 1(4), 256–260.
- Salaudeen, & Mashood, Y. (2024). Taxation and Sustainable Development Goals. *Munich Personal RePEc Archive*, 2116, 0–33.
- Sharma, M. D. (2023). The Triple Helix Concept : Examining the Interplay between Academia , Industry , and Government in Driving Innovation and Societal Impact. *Gyankosh: An Annual Double Blind Peer Reviewed Interdisciplinary Journal*, VI(December), 1–12.
- Sholihah, T., & Nuryadin, M. B. (2024). Analisis Peran Pajak Penghasilan Dalam Mendukung Inovasi Ekonomi Dalam Pertumbuhan Bisnis. *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, 8(12), 304–312.
- Siregar, R. A., & Patunru, A. (2021). The impact of tax incentives and IFRS adoption on foreign direct investment in ASEAN countries. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 5(2), 1195–1212.
- Utomo, S., & Harjono, A. N. (2021). Pentingnya Membangun Platform Kolaborasi Multi-Stakeholder sebagai Key Enabling Factor dalam Membangun Ekosistem Inovasi Industri 4.0 di Era New Normal. *Jurnal Informatika Universitas Pamulang*, 6(1), 67. <https://doi.org/10.32493/informatika.v6i1.8142>
- Waeytens, S. (2024). *Tax and Trade and Investment Instruments in Sustainable Development Goals Achievement*. 51–65.
- Yusuf, M., & Wibowo, B. (2024). Pembiayaan Infrastruktur Dengan Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Pada Proyek Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Oleh PT Adhi Jalintim Riau. *Jesya*, 7(2), 2110–2120. <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i2.1713>
- Zahrah, A., & Darmastuti, S. (2024). Inklusivitas Ekonomi Digital di Kawasan Asia Tenggara pada Kepemimpinan ASEAN 2023. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*.